

TAHAP PERCONTOHAN DI DUA LOKASI

## Parkir Jalan Prof Yohanes dan Limaran Layani Nontunai

**YOGYA (KR)** - Dua lokasi parkir yakni di Jalan Prof Yohanes dan Limaran kini melayani pembayaran nontunai. Pemkot Yogya bekerja sama dengan Bank BPD DIY sudah menyiapkan QRIS yang dapat dipindai oleh konsumen.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya Imanudin Aziz, menjelaskan penerapan layanan pembayaran parkir nontunai di dua lokasi tersebut merupakan percontohan sebelum diperluas ke lokasi lain. "Penerapan QRIS parkir itu masih percontohan. Untuk parkir tepi jalan umum (TJU) di Jalan Prof Yohanes sebelahnya Galeria Mall, sedangkan tempat khusus parkir (TKP) di Limaran," je-

lanya, Senin (7/3). Masing-masing juru parkir yang mengantongi izin dari Dinas Perhubungan juga telah dibekali kode. Begitu pula bagi pembantu juru parkir yang kodenya disesuaikan dengan pengelola. Penerapan QRIS tersebut menjadi alternatif pilihan bagi konsumen parkir. Hal ini karena pada era sekarang sebagian masyarakat lebih mengutamakan pembayaran secara nontunai. Sehingga

bagi yang tidak membawa uang tunai dapat memanfaatkan layanan tersebut. "Kode itu bisa dipindai dengan berbagai e wallet. Tarifnya juga sudah disesuaikan dengan perda," imbuh Aziz.

Di samping itu pihaknya juga masih mendiskusikan dengan para pengelola parkir agar teknisnya semakin efektif. Parkir yang dibayarkan melalui QRIS akan masuk ke rekening tampungan sementara di Bank BPD DIY. Selanjutnya setelah terakumulasi akan terlihat bagi hasil antara Pemkot dengan pengelola. Skema bagi hasil bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Namun demikian pihaknya juga akan mengevaluasi berbagai keku-

rangan sebelum diperluas ke lokasi lain.

Sementara itu salah satu pengelola parkir Jalan Prof Yohanes Sumarwanto, mengaku belum banyak konsumen yang memanfaatkan layanan QRIS tersebut. Pada Jumat (4/3) dan Sabtu (5/3) lalu masing-masing baru ada dua konsumen yang menggunakan. "Belum sampai sepuluh orang. Kadang-kadang ada konsumen yang merasa ribet dan memilih tunai saja. Kebanyakan malah seperti itu, bayar tunai," katanya.

Namun demikian, beberapa pembantu juru parkir justru berharap bisa tunai. Hal ini karena sistem upah yang diterima pembantu juru parkir ialah harian. Jika sepenuhnya menerapkan



KR-Istimewa

Layanan parkir di Jalan Prof Yohanes yang terpasang QRIS untuk pembayaran nontunai.

nontunai, maka bagi hasil harus menunggu sekian waktu sehingga pendapatan-

nya pun tidak bisa real time. Akan tetapi pihaknya tetap mengikuti kebijakan pemerin-

tan karena era sekarang juga menuntut digitalisasi layanan. (Dhi)-d

PTM DIREKOMENDASIKAN PEKAN DEPAN

## Pemkot Perpanjang Pembelajaran Daring

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya memperpanjang pembelajaran dalam jaringan (daring) atau pembelajaran jarak jauh hingga satu pekan. Oleh karena itu pembelajaran tatap muka (PTM) baru akan direkomendasikan mulai pekan depan atau 14 Maret 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya Budi Santoso Asrori, mengungkapkan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait keputusan PTM. "Kalau kita menargetkan siswa kelas akhir seperti kelas VI dan IX untuk direkomendasikan masuk (PTM). Tapi masih kita pertimbangkan kondisinya," jelasnya, Senin (7/3).

Sebelumnya, Pemkot Yogya sudah mengulurkan PTM 100 persen untuk semua jenjang pendidikan yang

menjadi kewenangannya. Akan tetapi mulai 1-7 Maret 2022 kegiatan PTM di sekolah dihentikan sementara dan kembali dilakukan secara daring sepenuhnya. Hal ini dengan pertimbangan lonjakan kasus Covid-19 yang cukup tinggi dan penularan cepat.

Budi mengaku, pihaknya juga tidak bisa memaksakan untuk bisa kembali menggelar PTM di tengah situasi yang belum kondusif. Hanya, siswa kelas akhir sudah mendekati ujian serta membutuhkan pembelajaran yang optimal guna mengakhiri jenjang pendidikan. "Kalau toh bisa PTM tetap harus disesuaikan dengan kebijakan PPKM level 3. Seperti kapasitas paling tidak ialah 50 persen dari daya tampung tiap ruang. Kemudian protokol kesehatan tentu juga harus ditingkatkan," urainya.

Diakuinya, penularan virus Corona masih cukup tinggi sehingga perlu ada upaya pengendalian yang dilakukan secara bersama-sama. Hal itu pula yang mendasari penghentian sementara PTM yang sempat digulirkan. Akan tetapi, pembelajaran daring juga tidak akan maksimal karena ada beberapa materi pelajaran yang sulit jika disampaikan secara jarak jauh. Kondisi itu pun berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.

Sementara Kepala Dinkes Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, mengaku sudah memberikan rekomendasi untuk memperpanjang pembelajaran daring hingga 14 Maret 2022 mendatang. Dirinya pun berharap dalam sepekan ini laju penambahan kasus bisa menurun sehingga PTM dapat digulirkan secara penuh kembali. (Dhi)-d

## Persaingan Sehat, Hasil Sesuai Target

**YOGYA (KR)** - Persaingan usaha penting untuk berkompetisi secara sehat memberikan pelayanan terbaik. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan inovasi-inovasi baru. Persaingan tidak sehat dengan penawaran harga di bawah pasar (banting harga) perlu diwaspadai dengan memperhatikan spek (spesifikasi) sudah sesuai atau jauh di bawah standar.

"Istilah Jawa *ana rega ana rupa*, ada harga ada kualitas. Bila pengguna jasa pemborong (kontraktor) memilih harga terendah harus sama jangan sampai menderita kerugian setelahnya karena ternyata kualitas pekerjaan tidak sesuai spek," demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Kontraktor Nasio-

nal (Askonas) M Lutfi Setiabudi ST kepada wartawan, Senin (7/3) di sela Focus Group Discussion (FGD) di Ros In Hotel.

Didampingi Ketua DPD Askonas DIY Belli Rudyanto SH MH, Lutfi menyebutkan FGD dengan tema iUrgensi Hukum Persaingan Usaha Di Bidang Jasa Konstruksi untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai hukum persaingan usaha kepada anggota Askonas. "Jadi Kontraktor anggota Askonas akan patuh hukum dengan penawaran yang wajar sesuai spek," tegasnya.

Lutfi juga mengajak pengguna jasa kontraktor dari instansi pemerintah maupun swasta untuk cermat jangan tergiur penawaran dengan harga rendah. "Jadi pemenang lelang

bukan penawaran harga terendah, tapi yang benar-benar berkualitas untuk menjamin pekerjaan sesuai target," tegasnya.

FGD dalam kesempatan ini menampilkan narasumber Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diwakili Kepala Kanwil VII KPPU M Hendry Setyawan SE MM dengan materi tentang KPPU dan Urgensi Hukum Persaingan Usaha, kemudian Deputi Bidang Penegakan Hukum diwakili oleh Gopprera Panggabean (Direktur Investigasi) materi Larangan Persekongkolan Tender di Bidang Jasa Konstruksi, dan Kepala Kanwil VII KPPU diwakili Kamal Barok (Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil VII KPPU) dengan materi Pembuktian dan Hukum Acara Persaingan Usaha.

FGD dihadiri juga pejabat terkait dari Pemda DIY, pengurus dan anggota Askonas. "Dengan persaingan usaha yang sehat yang diatur hukum, maka masyarakat akan mendapat layanan lebih seperti misal dulu Pertamina saat monopoli, kondisi SPBU banyak yang tak terurus. Kini setelah ada persaingan, SPBU-SPBU milik Pertamina semua bersih dan nyaman," tegas Hendry Setyawan saat FGD. (Vin)-d



KR-Juvintarto

FGD digelar Askonas DIY untuk persaingan usaha yang sehat.

## BPBD DIY Gencarkan Kampanye Prokes

**YOGYA (KR)** - Karakteristik penularan Covid-19 varian Omicron berbeda dengan penularan varian Delta yang merebak di DIY pada pertengahan 2021 lalu. Menyikapi kondisi tersebut dalam penanganan pandemi Covid-19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggunakan pendekatan yang berbeda. Salah satunya dengan mengencarkan kampanye pemakaian masker dan penegakan Prokes. Dengan model tersebut kami berharap terjadinya penularan bisa ditekan," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana di Kompleks Kependidikan, Senin (7/3).

Menurut Biwara, untuk varian Delta berdasarkan pengalaman yang ada cenderung menimbulkan gejala sedang hingga berat. Sehingga mereka yang terinfeksi membutuhkan perawatan di RS.



KR-Riyana Ekawati

Biwara Yuswantana

dan penegakan Prokes. Dengan model tersebut kami berharap terjadinya penularan bisa ditekan," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana di Kompleks Kependidikan, Senin (7/3).

Menurut Biwara, untuk varian Delta berdasarkan pengalaman yang ada cenderung menimbulkan gejala sedang hingga berat. Sehingga mereka yang terinfeksi membutuhkan perawatan di RS.

Karenanya, keberadaan Posko Dukungan Penanganan Covid-19 sangat diperlukan. Para relawan di Posko itu bertugas melakukan penjemputan, memakamkan jenazah pasien Covid-19, hingga menyiapkan peti jenazah.

Tapi untuk varian Omicron kondisinya masih relatif terkendali. Sehingga BPBD DIY belum berencana mengaktifkan kembali Posko Dukungan Penanganan Covid-19 meski angka kasus terkonfirmasi di DI Yogyakarta mengalami lonjakan. Karena pada akhir 2021 posko tersebut dibubarkan seiring dengan melandainya kasus terkonfirmasi di DIY.

"Saat ini, relawan yang dulunya bertugas di Posko Dukungan Penanganan Covid-19 juga masih berfokus untuk melakukan penanganan bencana alam. Terlebih DIY masih memasuki musim hujan.

"Sekarang lebih pada membuat potensi penularan bisa ditekan karena penularannya lebih cepat tapi tingkat keparahannya tidak seperti dulu. Di samping itu teman-teman ini kan ada banyak bencana lain yang harus ditangani termasuk angin kencang dan bencana hidrometeorologi," papar Biwara. (Ria)-d

## Akhsanul Fuadi, Ketua Umum JSIT DIY

**YOGYA (KR)** - Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Wilayah DIY menyelenggarakan Musyawarah Wilayah/Muswil V, Sabtu-Minggu (5-6/3). Dalam pertemuan yang menjadi forum tertinggi organisasi JSIT setiap 4 tahun tersebut, terpilih Dr Akhsanul Fuadi MPdI menggantikan Harman SPd MM. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan pengurus pusat JSIT Indonesia Ahmad Fikri MPd dan Suhartono MPd.

Dalam sambutannya Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang dibacakan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumber Daya Masyarakat Ir Aris Riyanta MSi mengatakan, Sekolah Islam Terpadu pada hakekatnya sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam secara terpadu, menyeluruh dan tidak parsial. Sekolah berbasis Islam memiliki beban yang berat, sebab membawa dua tugas sekaligus.

"Membangun pendidikan intelektual dan spiritual bagi peserta didik. Untuk itu perlu adanya partisipasi aktif baik peserta didik, orangtua, pemerintah dan

masyarakat," katanya.

Melalui Musyawarah Wilayah V ini diharapkan JSIT DIY mampu menjalankan fungsinya pelopor inovasi pendidikan, fasilitator pengembangan kualitas Sekolah

Islam Terpadu dan koordinator Sekolah Islam Terpadu untuk meningkatkan sinergi dengan pemangku kebijakan. Turut hadir sekaligus memberikan sambutan yaitu Wakil Kepala Disdikpora DIY Drs Suhirman MPd.

Humas JSIT DIY Rojikin SPd menambahkan, pada perhelatan muswil tersebut juga menampilkan kreativitas seni, di antaranya Sanggar Gending Gamelan dari Araithan Bantul, tari rampak dari SDIT Luqman Al Hakim 2 dan seni hadroh dari SDIT Al Khairaat Yogyakarta. Rangkaian kegiatan muswil diawali dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba untuk seluruh siswa Sekolah Islam Terpadu semua jenjang. Lomba hafalan Alquran, lomba pidato profil pelajar Pancasila dan turnamen futsal. (Feb)-d

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

### HADIRKAN RUH PANCASILA DI TENGAH MASYARAKAT Strategis, Jaga Warga Harus Diperkuat

**YOGYA (KR)** - Keberadaan Jaga Warga sebagai salah satu pranata sosial di masyarakat kini memiliki peran yang sangat strategis seiring ditetapkannya Perda DIY terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu perlu ada penguatan yang dilakukan oleh daerah terkait kelembagaan tersebut.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro SH, mengungkapkan implementasi Jaga Warga di tiap daerah kini sudah menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). "Jaga Warga ini menjadi salah satu garda terdepan yang diharapkan mampu menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan keberagaman," tandasnya.

Secara umum ketugasan Jaga Warga memang untuk menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta menumbuhkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Namun adanya perda terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan maka peran Jaga Warga menjadi semakin strategis dalam menyesuaikan regulasi tersebut. Sehingga Jaga Warga diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mewujudkan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan berbasis kemasyarakatan.

Wisnu menambahkan, semua organisasi perangkat

### Wisnu Sabdono Putro SH Fraksi PDI Perjuangan



KR-Istimewa

daerah (OPD) juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruh Pancasila dan keberagaman di masyarakat. Hal ini karena keberhasilan implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak serta merta mampu berjalan sendiri. "Dibutuhkan komitmen bersama dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oleh sebab itu dibutuhkan dukungan program dan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta," imbuhnya.

Penguatan Jaga Warga pun mutlak dibutuhkan. Terutama keterlibatan Pemkot Yogya agar keberadaan lembaga tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan optimal. Setidaknya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ketugasan Jaga Warga mampu difasilitasi. Apalagi pemerintah juga memiliki kepentingan agar kerifan lokal dan nilai-nilai Pancasila mampu terus mengakar di masyarakat. Sebagai contoh kecil, imbuh Wisnu, ialah semangat gotong royong sebagai salah satu nilai Pancasila. Gotong royong tidak hanya dilakukan oleh masyarakat melainkan aparat pemerintah baik Pemda DIY maupun Pemkot Yogya dalam mewujudkan kehidupan berlandaskan Pancasila. "Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi kunci keharmonisan serta produktivitas di tengah masyarakat," katanya. (Dhi)-d